



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan Laporan pertanggungjawaban Kepala Badan kepada WaliKota Bandar Lampung atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota disusun sebagai wujud pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. LPJ ini merupakan sarana penyampaian informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran, sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LPJ Wali Kota berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta hubungan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD.

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan dalam penyusunan



laporan pertanggung jawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 01);



13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 3);
16. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 32);

1.2 GAMBARAN UMUM BKAD

Pembentukan Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar



Lampung, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

BKAD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BKAD Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;



- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Penyusunan APBD; dan
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaran.
4. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Implementasi Konsepsi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan; dan
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. Bidang Perbendaharaan, membawahi :



- a. Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Kebijakan Belanja; dan
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
6. Bidang Aset Daerah, membawahi :
- a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung mengacu Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut :

1. *Kepala Badan* mempunyai tugas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan, investasi, pinjaman daerah dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan aset daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan aset daerah;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan aset daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi serta masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi dibidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan aset daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
2. *Sekretariat* dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa



penunjang urusan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi : pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran BKAD; pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan asset/barang milik daerah, kerjasama hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, urusan humas, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas; melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai serta pensiun; menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan umum dan kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



b. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

3. *Bidang Anggaran* dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang anggaran meliputi kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran. Bidang anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugasnya kepala bidang anggaran mempunyai tugas: Perumusan kebijakan teknis dibidang kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran; pelaksanaan kebijakan dan kewenangan di bidang kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran; pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran; pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Anggaran membawahi:



- a. Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran; dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Perencanaan Anggaran; menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD; menyiapkan bahan penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan; menyiapkan bahan kelengkapan administrasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang kebijakan perencanaan anggaran; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan;
- b. Sub Bidang Penyusunan APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan (RAPBD) dan (RPAPBD); menyiapkan bahan penyusunan nota keuangan; melaksanakan verifikasi RKA/RKPA- Perangkat Daerah (PD), DPA/DPPA- Perangkat Daerah (PD); menyiapkan bahan penyusunan DPA/DPPA- Perangkat Daerah (PD); melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang penyusunan APBD; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.



4. *Bidang Akuntansi*, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang akuntansi meliputi monitoring dan evaluasi laporan keuangan Perangkat Daerah (PD), akuntansi dan pelaporan serta implementasi konsepsi kebijakan akuntansi pemerintahan. Bidang Akuntansi mempunyai fungsi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah (PD) dan BLUD dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah bidang akuntansi; pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang akuntansi; perumusan konsepsi kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung berdasarkan perundang-undangan; pemantauan dan pengendalian penyertaan modal daerah yang ada di BUMD; Penyiapan bahan dalam rangka memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pinjaman daerah; pembuatan dan pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pada bidang akuntansi; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan



pemerintah daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Akuntansi membawahi :

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah; membantu memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk; melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah semester pertama dan prognosis semester kedua; melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; membantu meningkatkan kompetensi SDM penyusunan laporan keuangan pada Perangkat Daerah (PD) dan BLUD; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang akuntansi dan pelaporan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Sub bidang Impementasi Konsepsi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan; mempunyai tugas merumuskan konsepsi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; merumuskan tahap-tahap implementasi konsepsi kebijakan dan sistem akuntansi pada tingkat Perangkat Daerah (PD); merumuskan petunjuk teknis serta rencana strategis peningkatan kualitas laporan keuangan daerah;



menyiapkan bahan perumusan dan pengembangan teknologi informasi sebagai alat bantu peningkatan kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah (PD), BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah; menyiapkan bahan perumusan program kerja dan rencana kegiatan bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas; menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang akuntansi; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang implementasi konsepsi kebijakan akuntansi pemerintahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

5. *Bidang Perbendaharaan*, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang perbendaharaan meliputi pengeluaran kas dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan administrasi gaji serta kebijakan belanja. Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan; pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang



perbendaharaan; penyusunan dan fasilitasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga / instansi terkait kegiatan bidang perbendaharaan; penerbitan SP2D dan kelengkapannya; pengendalian Belanja Perangkat Daerah (PD); pelaksanaan administrasi pengelolaan gaji pegawai; pelaksanaan penunjukan kas daerah; pengelolaan utang dan piutang daerah; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan perbendaharaan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Perbendaharaan membawahi:

- a. Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran; mempunyai tugas membantu melakukan uji formal terhadap SPM dan pengendalian belanja Perangkat Daerah (PD); menyiapkan SP2D dan kelengkapannya; mengumpulkan dan membantu melakukan verifikasi laporan fungsional Perangkat Daerah (PD); melaksanakan analisis pemberdayaan dan pemanfaatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang pengeluaran kas dan fasilitasi pelaksanaan anggaran; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



- b. Sub Bidang Kebijakan Belanja mempunyai tugas melakukan pembinaan pada bendahara Perangkat daerah (PD); menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah; menyiapkan bahan keputusan Kepala Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi penyerapan dana perimbangan; melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang Kebijakan Belanja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
6. *Bidang Aset Daerah*, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang aset meliputi penatausahaan aset daerah, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah serta pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah. Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah; pengoordinasian pelaksanaan pengamanan administrasi aset daerah; penyimpanan dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah; pengoordinasian



pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan; pengoordinasian pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah; penyiapan bahan untuk penjualan aset daerah yang dilakukan secara lelang; pengoordinasian pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan aset daerah; penyiapan bahan untuk penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan; penyiapan bahan dalam rangka Tuntutan Ganti Rugi (TGR); pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dengan aset daerah; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, Bidang Aset Daerah membawahi :

- a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penilaian aset daerah dalam rangka pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh



penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Wali Kota; melaksanakan pengamanan administrasi aset daerah; menyimpan dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah; melakukan monitoring atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyusun dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan; menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain/terkait tugas pemanfaatan dan pengawasan aset daerah; menyiapkan bahan dalam rangka proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR); melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pemanfaatan dan pengawasan aset daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- b. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi pemindahtanganan aset daerah; menyiapkan bahan untuk penilaian aset daerah dalam rangka pemindahtanganan aset daerah yang dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik; melaksanakan pengelolaan



administrasi pemusnahan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan pengelolaan administrasi penghapusan aset daerah yang disebabkan karena penyerahan, pengalihan status, pemindahtanganan, dan tindak lanjut putusan pengadilan; menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain/terkait tugas pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Kas Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 96 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kas Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, UPT Kasda merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. UPT Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Kas Daerah meliputi Pelayanan Administrasi keuangan, penerimaan,



pengeluaran, dan pencatatan pajak daerah dan pelaporan kas daerah.

8. *Kelompok Jabatan Fungsional*

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.1 SUMBER DAYA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Per 31 Desember 2025 berjumlah 104 orang dan Tenaga Kontrak BKAD berjumlah 87 orang, dan tenaga kontrak BKO berjumlah 2 orang, dengan rincian PNS sebagai berikut :

Tabel 1.2.1.A

PNS BKAD KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN JABATAN

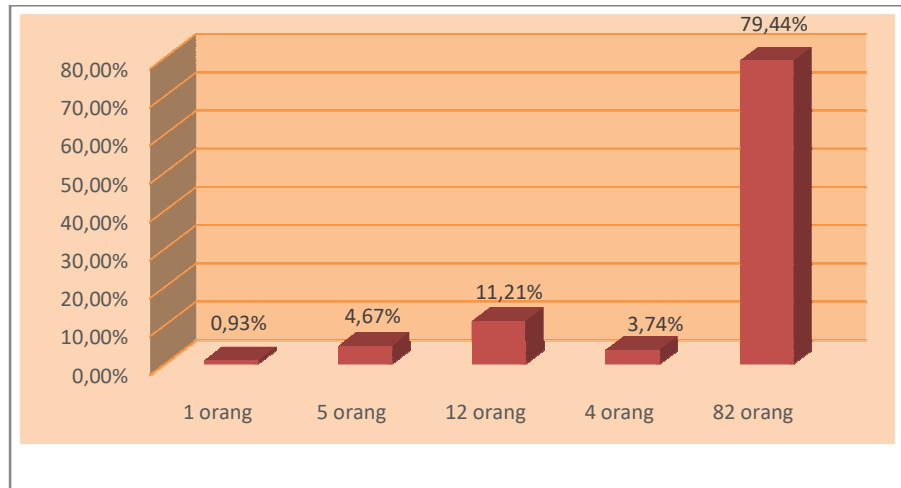
No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1 Orang	0,93 persen



No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
2.	Eselon III	5 Orang	4,67 persen
3.	Eselon IV	12 Orang	11,21 persen
4.	Fungsional Perencana	4 Orang	3,74 persen
5.	Non Eselon	82 Orang	79,44 persen
	Jumlah	104 Orang	100,00 persen

Dengan Grafik PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jabatan dapat digambarkan sebagaimana Grafik 1.A berikut :

Grafik 1.APNS BKAD Kota Bandar Lampung Berdasarkan Jabatan



Tabel 1.2.1. B

**PNS BKAD KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN GOLONGAN**

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1.	Pembina (IV/ a)	35 orang	33,65 persen
2.	Penata Tk I (III/d)	41 orang	39,42 persen
3.	Penata (III/c)	16 orang	15,3 persen
4.	Penata MudaTk I (III/b)	4 orang	3,85 persen
5.	Penata Muda (III/a)	5 orang	4,81 persen
6.	Pengatur Tk I (II/d)	2 orang	1,92 persen
7.	Golongan V (PPPK)	1 orang	0,96 persen
	Jumlah	104 orang	100,00 persen

Dengan Grafik PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Status Kepegawaian dapat digambarkan sebagaimana Grafik 1.B berikut :

Grafik 1.B PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Golongan

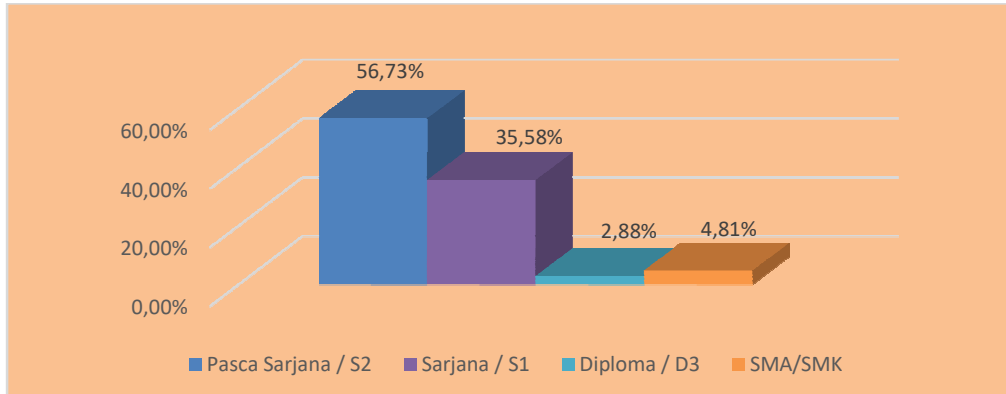


Tabel 1.2.1.C
PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pasca Sarjana / S2	59 Orang	56,73 persen
2.	Sarjana / S1	37 Orang	35,58 persen
3.	Diploma / D3	3 Orang	2,88 persen
4.	SMA/SMK	5 Orang	4,81 persen
Jumlah		104 Orang	100,00 persen

Dengan PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat digambarkan sebagaimana Grafik 1.C berikut :

Grafik 1. CPNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

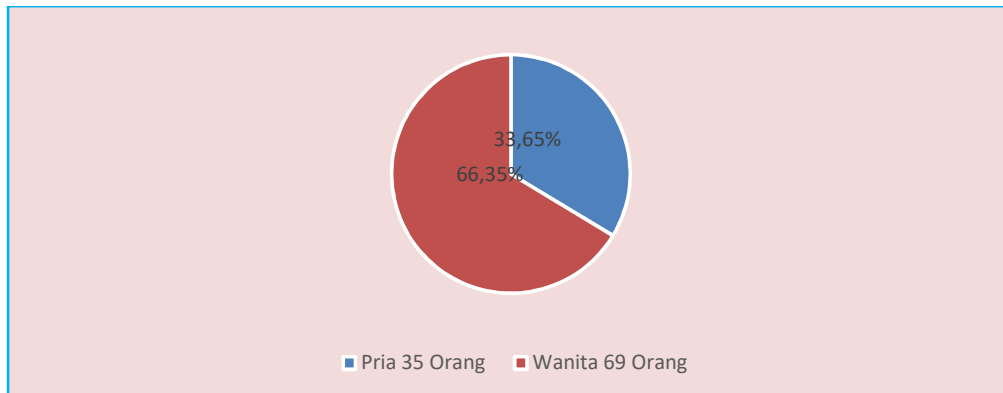


Tabel I.2.1.D.
PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pria	35 Orang	33,65 persen
2.	Wanita	69 Orang	66,35 persen
Jumlah		104 Orang	100,00 persen

Dengan Grafik PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat digambarkan sebagaimana Grafik 1.D berikut :

Grafik 1.D PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jenis Kelamin





1.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Perlengkapan yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

a. Sarana

Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sudah menempati Gedung Baru yang cukup memadai, yang beralamat di Jalan Dr. Susilo No. 02 Lantai 4 Bandar Lampung.

b. Prasarana

- Prasarana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pada Tahun 2025 untuk kendaraan dinas/operasional dan peralatan kantor dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 1.2.2.A
Rincian Kendaraan Dinas /Operasional BKAD
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	7 Unit	Mobil Jabatan
2.	Motor	15 Unit	Motor Operasional

Tabel 1.2.2 B
Peralatan Kantor BKAD Kota Bandar Lampung

No.	Nama Barang	Jumlah	Merk	Keterangan
1.	Air Conditioner (AC)	13Unit	-	ADA
2.	Printer Inkjet / Laset Jet	155 Unit	-	ADA



No.	Nama Barang	Jumlah	Merk	Keterangan
3.	Mesin Photocopy	2 Unit	-	ADA
4.	Tablet	12 unit	Samsung	ADA
5.	Laptop	73unit	-	ADA
6.	Komputer	193unit	-	ADA
7.	Kamera Digital	3 buah	Canon	ADA
8.	Vidio Convergence Kamera	1 buah	Logitech	ADA
9.	Hard Disk	11buah	Toshiba	ADA
10.	Handy Cam	2 buah	Sony	ADA
11.	Filling Cabinet	12 buah	-	ADA
12.	Filling Cabinet 6 laci	2 buah	-	ADA
13.	Lemari Besi	27 buah	-	ADA
14.	Lemari Kayu	4 buah	-	ADA
15.	Lemari Arsip	3 buah	-	ADA
16.	Lemari Set	5 buah		ADA
17.	Karpet	1 set	-	ADA
18.	Gorden	1 set		ADA
19.	UPS	64 buah	-	22 Unit SIPKD
20.	Lemari Server	1 buah	-	SIPKD
21.	Finger Print dan Kunci Otomatis	10 buah	-	ADA
22.	Mesin Penghitung Uang	7 buah	CO AIM	ADA
23.	Mesin absen	3 buah	-	ADA
24.	Mesin Penghancur Kertas	29 buah	Dino	ADA
25.	Mesin Tik	8 buah	-	ADA
26.	Meja Pejabat Indachi	2 unit	Indachi	ADA
27.	Meja Kerja	204 buah	-	ADA
28.	Meja Kerja 1 biro	21 buah	-	ADA
29.	Meja Kerja ½ biro	26 buah	-	ADA
30.	Meja Komputer	14 buah	-	ADA
31.	Meja Rapat	2 set	-	ADA
32.	Wirelles	11 buah	-	ADA
33.	DVD	2 buah	-	ADA
34.	Kulkas	4 buah	-	ADA
35.	TV	15 buah	-	ADA



No.	Nama Barang	Jumlah	Merk	Keterangan
36.	Sofa jati ukir	2 set	-	ADA
37.	Sofa jok	3 set	-	ADA
38.	Kursi Direktur	7 unit	-	ADA
39.	Kursi Staff	120 unit	-	ADA
40.	Kursi putar besar	26 buah	-	ADA
41.	Kursi putar kecil	94 buah	-	ADA
42.	Kursi stainless	181 buah	-	ADA
43.	Kursi Tunggu	2 buah	-	ADA
44.	Tabung Pemadam	8 buah	-	ADA
45.	Faximil	2 buah	-	ADA
46.	Telepon/airphone	3 buah	-	ADA
47.	Exhause fan	28 buah	-	ADA
48.	Brankas	5 buah	-	ADA
49.	Kipas Angin	1 buah	-	ADA
50.	Acces point	4 unit	-	ADA
51.	LCD Projektor	4 unit	-	ADA
52.	Rak Buku	1 buah	-	ADA
53.	Jaringan Komputer	8 unit	-	SIPKD
54.	Software	6 unit	-	SIPKD
55.	Server	4 unit	-	SIPKD
56.	Finger Print	9 buah	-	ADA
57.	CCTV	1 buah	-	ADA
58.	Mic Wireless	8 buah	-	ADA
59.	HDD Eksternal	14 buah	-	SIPKD
60.	Scaner	3 buah	-	SIPKD
61.	Processor server + heat link	1 unit	-	SIPKD
62.	Rak Server	1 unit	-	SIPKD
63.	Hub Switch	2 unit	-	SIPKD
64.	RAM server	2 buah	-	SIPKD
65.	Mesin Antrian	1 buah	-	ADA
66.	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3 unit	-	ADA
67.	Plang Nama PEMKOT	80 unit	-	ADA
68.	Bracket	1 unit	-	ADA
69.	Bracket Standing	1 unit	-	ADA
70.	Rak Arsip	5 unit	-	ADA



No.	Nama Barang	Jumlah	Merk	Keterangan
71.	Speaker Aktif	1 unit	-	ADA
72.	Lemari Partisi	2 unit	-	ADA

Perlengkapan dan Peralatan Kantor BKAD Kota Bandar Lampung sudah cukup memadai, namun seiring dengan semakin tingginya volume pekerjaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandar Lampung, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung perlu mendapatkan penambahan perlengkapan dan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.

1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI

➤ *terlampir*



BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

2.1 PERUBAHAN ANGGARAN

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan anggaran pada semester pertama, serta mempertimbangkan capaian kinerja, proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun anggaran dan kebijakan strategis pemerintah daerah.

Perubahan anggaran meliputi penyesuaian pada struktur belanja, baik belanja operasi, belanja modal, maupun belanja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian tersebut antara lain berupa:

1. Realokasi anggaran antar kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja.
2. Penambahan anggaran pada kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.
3. Penyesuaian anggaran pada kegiatan yang pelaksanaannya mengalami perubahan skala, metode, atau waktu pelaksanaan.
4. Efisiensi anggaran pada kegiatan yang dinilai kurang optimal atau dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kota bandar Lampung ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2024 Tanggal



31 Desember 2024 dan APBD Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2025 tanggal 22 September 2025.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 1 (satu) Program Non Urusan/Rutinyaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dan 2 (dua) Program Urusan Wajib /Prioritas yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan. Program Non Urusan /Rutindan Program Urusan Wajib/Prioritas dengan anggaran sebesar **Rp270.342.393.696,00** dan realisasi anggaran sebesar **Rp131.160.492.529,00** atau persentase realisasi anggaran sebesar **48,52 persen** dengan capaian kinerja dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 :



Tabel 2.1
Penjabaran Perubahan Anggaran BKAD
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			265.297.118.960,00			270.342.393.696,00	
5.02	KEUANGAN			265.297.118.960,00			270.342.393.696,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	100 persen	143.011.279.734,00	Bandar Lampung	100 persen	128.794.087.416,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penggangan, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100 persen	644.163.784,00	Bandar Lampung	100 persen	579.718.974,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	136.177.791,00	Bandar Lampung	2 dokumen	146.482.343,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	62.069.553,00	Bandar Lampung	1 dokumen	58.050.119,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	59.185.032,00	Bandar Lampung	1 dokumen	53.532.040,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	70.951.925,00	Bandar Lampung	1 dokumen	31.771.888,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	64.170.422,00	Bandar Lampung	1 dokumen	59.869.426,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	124.015.021,00	Bandar Lampung	3 laporan	121.223.498,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	127.594.040,00	Bandar Lampung	5 laporan	108.789.660,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Yang Tertib	100 persen	134.866.565.557,00	Bandar Lampung	100 persen	120.444.753.673,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	127 orang	133.849.393.701,00	Bandar Lampung	127 orang	119.428.562.877,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1240 dokumen	606.951.518,00	Bandar Lampung	1240 dokumen	609.480.786,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulan/triwulanan/semesteran SKPD	13 laporan	410.220.338,00	Bandar Lampung	13 laporan	406.710.010,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 persen	288.037.608,00	Bandar Lampung	100 persen	188.037.608,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	100.000.000,00	Bandar Lampung	1 paket	0,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 orang	188.037.608,00	Bandar Lampung	7 orang	188.037.608,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	100 persen	1.592.194.785,00	Bandar Lampung	100 persen	1.794.273.961,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	115.002.552,00	Bandar Lampung	3 paket	115.002.552,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	180.005.288,00	Bandar Lampung	4 paket	172.223.086,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 paket	78.305.810,00	Bandar Lampung	6 paket	78.305.810,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	78.000.000,00	Bandar Lampung	7 paket	78.000.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	9 paket	188.707.194,00	Bandar Lampung	9 paket	150.965.532,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 dokumen	38.040.000,00	Bandar Lampung	6 dokumen	38.560.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	89.000.000,00	Bandar Lampung	10 laporan	89.000.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	260.303.196,00	Bandar Lampung	8 laporan	513.706.236,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	564.830.745,00	Bandar Lampung	1 dokumen	558.510.745,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	100 persen	795.400.000,00	Bandar Lampung	100 persen	738.358.000,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	100 persen	500.000.000,00	Bandar Lampung	100 persen	500.000.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	100.000.000,00	Bandar Lampung	8 unit	86.158.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	195.400.000,00	Bandar Lampung	5 unit	152.200.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100 persen	4.252.498.000,00	Bandar Lampung	100 persen	4.476.525.200,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	1 laporan	252.010.000,00	Bandar Lampung	1 laporan	252.010.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	1 laporan	4.000.488.000,00	Bandar Lampung	1 laporan	4.224.515.200,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	100 persen	572.420.000,00	Bandar Lampung	100 persen	572.420.000,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	52.430.000,00	Bandar Lampung	1 unit	52.430.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	313.790.000,00	Bandar Lampung	18 unit	313.790.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	78.500.000,00	Bandar Lampung	10 unit	78.500.000,00	Bandar Lampung
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	127.700.000,00	Bandar Lampung	1 unit	127.700.000,00	Bandar Lampung
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP	119.389.920.913,00	Bandar Lampung	WTP	137.958.999.514,00	Bandar Lampung
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 persen			100 persen		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persen	4.896.606.259,00	Bandar Lampung	100 persen	5.042.943.937,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	852.820.815,00	Bandar Lampung	2 dokumen	773.133.061,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 dokumen	468.343.620,00	Bandar Lampung	2 dokumen	451.620.580,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	2 dokumen	701.846.861,00	Bandar Lampung	2 dokumen	695.846.861,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	2 dokumen	722.855.426,00	Bandar Lampung	2 dokumen	716.855.426,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	2 dokumen	629.080.311,00	Bandar Lampung	2 dokumen	785.346.673,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan anggaran pendapatan	3 dokumen	713.273.825,00	Bandar Lampung	3 dokumen	820.473.825,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	2 dokumen	808.385.401,00	Bandar Lampung	2 dokumen	799.667.511,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 persen	6.477.527.228,00	Bandar Lampung	100 persen	6.614.782.975,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	12 dokumen	1.100.000.000,00	Bandar Lampung	12 dokumen	1.484.557.580,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	3 dokumen	1.329.175.133,00	Bandar Lampung	3 dokumen	1.279.351.155,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	12 dokumen	720.000.000,00	Bandar Lampung	12 dokumen	653.428.367,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	5 laporan	581.946.792,00	Bandar Lampung	5 laporan	554.886.732,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	12 dokumen	391.689.293,00	Bandar Lampung	12 dokumen	400.385.593,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	54 dokumen	1.005.476.010,00	Bandar Lampung	54 dokumen	997.144.188,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	15 dokumen	1.349.240.000,00	Bandar Lampung	15 dokumen	1.245.029.360,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentasi Terlaksananya Koordinasi dan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	WTP	1.566.054.202,00	Bandar Lampung	WTP	1.451.882.412,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, bulanan, triwulan dan semesteran	14 laporan	367.057.439,00	Bandar Lampung	14 laporan	369.874.677,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	1 laporan	420.316.438,00	Bandar Lampung	1 laporan	372.766.438,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	5 dokumen	433.735.848,00	Bandar Lampung	5 dokumen	425.096.343,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 dokumen	74.646.523,00	Bandar Lampung	1 dokumen	13.847.000,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	162 orang	162.512.169,00	Bandar Lampung	162 orang	162.512.169,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota di bina	32 lembaga	107.785.785,00	Bandar Lampung	32 lembaga	107.785.785,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Urusan Pinjaman Daerah, Hibah Dan Bansos, Dan Urusan Darurat	100 persen	104.409.912.587,00	Bandar Lampung	100 persen	122.692.434.002,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	1 laporan	57.196.935,00	Bandar Lampung	1 laporan	49.083.000,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	6 laporan	12.675.516.689,00	Bandar Lampung	6 laporan	12.675.516.689,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 laporan	35.207.198.963,00	Bandar Lampung	12 laporan	34.307.034.313,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 laporan	56.470.000.000,00	Bandar Lampung	12 laporan	75.660.800.000,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 persen	2.039.820.637,00	Bandar Lampung	100 persen	2.156.956.188,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	4 dokumen	187.157.370,00	Bandar Lampung	4 dokumen	161.724.370,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan system informasi pemerintah daerah	12 dokumen	299.024.220,00	Bandar Lampung	12 dokumen	286.000.000,00	Bandar Lampung
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	30 orang	1.553.639.047,00	Bandar Lampung	30 orang	1.709.231.818,00	Bandar Lampung
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE LAPORAN BMD KOTA BANDAR LAMPUNG YANG TEPAT WAKTU	100 persen	2.895.918.313,00	Bandar Lampung	100 persen	3.589.306.766,00	Bandar Lampung



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persen	2.895.918.313,00	Bandar Lampung	100 persen	3.589.306.766,00	Bandar Lampung
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	1 dokumen	216.266.278,00	Bandar Lampung	1 dokumen	216.266.278,00	Bandar Lampung
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen	108.073.076,00	Bandar Lampung	2 dokumen	108.073.076,00	Bandar Lampung
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	182.503.480,00	Bandar Lampung	1 laporan	182.503.480,00	Bandar Lampung
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan laporan hasil pengamanan barang milik daerah	1 laporan	960.659.566,00	Bandar Lampung	1 laporan	960.659.566,00	Bandar Lampung
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	120.580.578,00	Bandar Lampung	1 laporan	120.580.578,00	Bandar Lampung
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemu snahan, dan penghapusan barang milik daerah	20 dokumen	425.289.273,00	Bandar Lampung	20 dokumen	507.787.273,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025			PERUBAHAN TAHUN 2025		
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	2 dokumen	677.248.328,00	Bandar Lampung	2 dokumen	765.248.328,00	Bandar Lampung
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	1 laporan	205.297.734,00	Bandar Lampung	1 laporan	728.188.187,00	Bandar Lampung



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025



2.2 REALISASI ANGGARAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) Program Non Urusan/Rutinyaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dan 2 (dua) Program Urusan Wajib/Prioritas yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, dari Program Non Urusan/Rutindan Program Urusan Wajib/Prioritas dengan anggaran sebesar **Rp137.958.999.514,00** dan realisasi anggaran sebesar **Rp73.014.672.415,00** atau persentase realisasi anggaran sebesar **52,92persen**, dengan capaian kinerja dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 :

TABEL 2.1
PENJABARAN DAN REALISASI ANGGARAN
BKAD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	270.342.393.696,00	131.160.442.529,00	48,52 persen	139.181.951.167,00
5.02	KEUANGAN	270.342.393.696,00	131.160.442.529,00	48,52 persen	139.181.951.167,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.794.087.416,00	55.430.595.739,00	43,04 persen	73.363.491.677,00



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.01. 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	579.718.974,00	517.874.228,00	89,33 persen	61.844.746,00
5.02.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.482.343,00	114.782.280,00	78,36 persen	31.700.063,00
5.02.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	58.050.119,00	52.049.935,00	89,66 persen	6.000.184,00
5.02.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	53.532.040,00	50.113.535,00	93,61 persen	3.418.505,00
5.02.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	31.771.888,00	24.833.719,00	78,16 persen	6.938.169,00
5.02.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	59.869.426,00	58.438.530,00	97,61 persen	1.430.896,00
5.02.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121.223.498,00	114.341.320,00	94,32 persen	6.882.178,00
5.02.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.789.660,00	103.264.909,00	94,92 persen	5.524.751,00
5.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120.444.753.673,00	48.284.495.258,00	40,09 persen	72.160.258.415,00
5.02.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119.428.562.877,00	47.456.521.912,00	39,74 persen	71.972.040.965,00
5.02.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	609.480.786,00	512.826.505,00	84,14 persen	96.654.281,00
5.02.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	406.710.010,00	315.146.841,00	77,49 persen	91.563.169,00
5.02.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.037.608,00	186.040.000,00	98,94 persen	1.997.608,00
5.02.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00 persen	0,00



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	188.037.608,00	186.040.000,00	98,94 persen	1.997.608,00
5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.794.273.961,00	1.586.677.406,00	88,43 persen	207.596.555,00
5.02.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	115.002.552,00	100.118.583,00	87,06 persen	14.883.969,00
5.02.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.223.086,00	145.840.451,00	84,68 persen	26.382.635,00
5.02.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.305.810,00	76.127.375,00	97,22 persen	2.178.435,00
5.02.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.000.000,00	21.413.000,00	27,45 persen	56.587.000,00
5.02.01.2 .06.0005	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	150.965.532,00	135.500.247,00	89,76 persen	15.465.285,00
5.02.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	38.560.000,00	38.560.000,00	100,00 persen	0,00
5.02.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.000.000,00	52.800.000,00	59,33 persen	36.200.000,00
5.02.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513.706.236,00	480.935.430,00	93,62 persen	32.770.806,00
5.02.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	558.510.745,00	535.382.320,00	95,86 persen	23.128.425,00
5.02.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	738.358.000,00	228.837.491,00	30,99 persen	509.520.509,00
5.02.01.2 .07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000,00	0,00	0,00 persen	500.000.000,00
5.02.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.158.000,00	85.118.500,00	98,79 persen	1.039.500,00
5.02.01.2 .07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.200.000,00	143.718.991,00	94,43 persen	8.481.009,00



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.476.525.200,00	4.191.386.045,00	93,63 persen	285.139.155,00
5.02.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	252.010.000,00	225.472.645,00	89,47 persen	26.537.355,00
5.02.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.224.515.200,00	3.965.913.400,00	93,88 persen	258.601.800,00
5.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	572.420.000,00	435.285.311,00	76,04 persen	137.134.689,00
5.02.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.430.000,00	36.019.419,00	68,70 persen	16.410.581,00
5.02.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.790.000,00	228.106.056,00	72,69 persen	85.683.944,00
5.02.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.500.000,00	68.156.036,00	86,82 persen	10.343.964,00
5.02.01.2 .09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.700.000,00	103.003.800,00	80,66 persen	24.696.200,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	137.958.999.514,00	73.014.672.415,00	52,92 persen	64.944.327.099,00
5.02.02. 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.042.943.937,00	4.176.779.530,00	82,82 persen	866.164.407,00
5.02.02.2 .01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	773.133.061,00	567.477.363,00	73,40 persen	205.655.698,00
5.02.02.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	451.620.580,00	371.329.831,00	82,22 persen	80.290.749,00



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.02.2 .01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	695.846.861,00	601.165.628,00	86,39 persen	94.681.233,00
5.02.02.2 .01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	716.855.426,00	630.327.899,00	87,93 persen	86.527.527,00
5.02.02.2 .01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	785.346.673,00	709.021.131,00	90,28 persen	76.325.542,00
5.02.02.2 .01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	820.473.825,00	651.055.256,00	79,35 persen	169.418.569,00
5.02.02.2 .01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	799.667.511,00	646.402.422,00	80,83 persen	153.265.089,00
5.02.02. 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6.614.782.975,00	5.452.862.228,00	82,43 persen	1.161.920.747,00
5.02.02.2 .02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.484.557.580,00	1.208.287.063,00	81,39 persen	276.270.517,00
5.02.02.2 .02.0003	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1.279.351.155,00	1.125.650.615,00	87,99 persen	153.700.540,00
5.02.02.2 .02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	653.428.367,00	460.422.742,00	70,46 persen	193.005.625,00
5.02.02.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	554.886.732,00	497.536.607,00	89,66 persen	57.350.125,00



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.02.2 .02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	400.385.593,00	368.405.567,00	92,01 persen	31.980.026,00
5.02.02.2 .02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	997.144.188,00	884.158.855,00	88,67 persen	112.985.333,00
5.02.02.2 .02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1.245.029.360,00	908.400.779,00	72,96 persen	336.628.581,00
5.02.02. 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.451.882.412,00	1.279.563.295,00	88,13 persen	172.319.117,00
5.02.02.2 .03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	369.874.677,00	340.496.572,00	92,06 persen	29.378.105,00
5.02.02.2 .03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	372.766.438,00	317.361.223,00	85,14 persen	55.405.215,00
5.02.02.2 .03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	425.096.343,00	385.316.896,00	90,64 persen	39.779.447,00



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.02.2 .03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	13.847.000,00	9.263.000,00	66,90 persen	4.584.000,00
5.02.02.2 .03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota	162.512.169,00	141.155.560,00	86,86 persen	21.356.609,00
5.02.02.2 .03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	107.785.785,00	85.970.044,00	79,76 persen	21.815.741,00
5.02.02. 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	122.692.434.002,00	60.206.493.274,00	49,07 persen	62.485.940.728,00
5.02.02.2 .04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	49.083.000,00	41.696.000,00	84,95 persen	7.387.000,00
5.02.02.2 .04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12.675.516.689,00	6.624.197.088,00	52,26 persen	6.051.319.601,00
5.02.02.2 .04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	34.307.034.313,00	18.105.208.010,00	52,77 persen	16.201.826.303,00
5.02.02.2 .04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	75.660.800.000,00	35.435.392.176,00	46,83 v	40.225.407.824,00
5.02.02. 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2.156.956.188,00	1.898.974.088,00	88,04 persen	257.982.100,00
5.02.02.2 .05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	161.724.370,00	143.545.039,00	88,76 persen	18.179.331,00
5.02.02.2 .05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	286.000.000,00	257.300.000,00	89,97 persen	28.700.000,00



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02.02.2 .05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.709.231.818,00	1.498.129.049,00	87,65 persen	211.102.769,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.589.306.766,00	2.715.224.375,00	75,65 persen	874.082.391,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.589.306.766,00	2.715.224.375,00	75,65 persen	874.082.391,00
5.02.03.2 .01.0001	Penyusunan Standar Harga	216.266.278,00	214.444.350,00	99,16 persen	1.821.928,00
5.02.03.2 .01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	108.073.076,00	70.115.030,00	64,88 persen	37.958.046,00
5.02.03.2 .01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	182.503.480,00	85.683.774,00	46,95 persen	96.819.706,00
5.02.03.2 .01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	960.659.566,00	602.922.554,00	62,76 persen	357.737.012,00
5.02.03.2 .01.0008	Penilaian barang milik daerah	120.580.578,00	95.904.247,00	79,54 persen	24.676.331,00
5.02.03.2 .01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah	507.787.273,00	313.110.679,00	61,66 persen	194.676.594,00
5.02.03.2 .01.0011	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	765.248.328,00	619.990.174,00	81,02 persen	145.258.154,00
5.02.03.2 .01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	728.188.187,00	713.053.567,00	97,92 persen	15.134.620,00



BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BKAD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan/Bidang Urusan Keuangan

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah. Didalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, maka pada Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan 1 (satu) Program Non Urusan/Rutin dan 2 (dua) Program Urusan Wajib/Prioritas dengan total 13 (tiga belas) kegiatan dan 65 (*enam puluh lima*) sub kegiatan. Dari keseluruhan program/kegiatan tersebut terdapat program dan kegiatan yang bersifat urusan wajib/prioritas yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 27 (*duapuluh tujuh*) sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp137.958.999.514,00** dan realisasi anggaran sebesar **Rp73.014.672.415,00** atau persentase realisasi anggaran sebesar **52,92persen**, sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 8 (*delapan*) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp3.589.306.766,00** dan realisasi anggaran sebesar



Rp2.715.224.375,00 atau persentase realisasi anggaran sebesar **75,65 persen**, dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan dukungan anggaran sebesar **Rp137.958.999.514,00** realisasi sebesar **Rp73.014.672.415,00** atau persentase realisasi anggaran sebesar **52,92persen**, dengan target kinerja Persentase Laporan Keuangan tepat waktu, tingkat capaian kinerja sebesar 103,33persen, didukung oleh 5 (lima) kegiatan:

I. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran

Daerah, dengan anggaran sebesar Rp5.042.943.937,00,00, realisasi sebesar Rp4.176.779.530,00 atau 82,82persen, target kinerja yaitu Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, tingkat capaian kinerjasebesar 100,00 persen, didukung oleh 7 (tujuh) sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp773.133.061,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp567.477.363,00 atau 73,40 persen. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen KUA dan PPAS, tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.



2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp451.620.580,00 dan realisasi anggaran sebesar
3. Rp371.329.831,00 atau 82,22 persen. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp695.846.861,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp601.165.628,00 atau 86,39 persen. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen perda APBD dan dokumen perwal penjabaran APBD, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp716.855.426,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp630.327.899,00 atau 87,93 persen. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan dokumen perwal penjabaran perubahan APBD, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.



6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp785.346.673,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp709.021.131,00 atau 90,28 persen. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.
7. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp820.473.825,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp651.055.256,00 atau 79,35 persen. Target kinerja 3 (tiga) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.
8. Koordiansi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp799.667.511,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp646.402.422,00 atau 80,83 persen. Target kinerja 3 (tiga) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.

II. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp6.614.782.975,00 realisasi sebesar Rp5.452.862.228,00 atau 82,43 persen,



target kinerja yaitu Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, tingkat capaian kinerjasebesar 100 persen, didukung oleh 7 (tujuh) sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp1.484.557.580,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.208.287.063,00 atau 81,39 persen. Target kinerja 12 (dua belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.
2. Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp1.279.351.155,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.125.650.615,00 atau 87,99 persen. Target kinerja 3 (tiga) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.
3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp653.428.367,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp460.422.742,00 atau 70,46 persen. Target kinerja



12(dua belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

4. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp554.886.732,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp497.536.607,00 atau 89,66 persen. Target kinerja 5 (lima) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK), tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.
5. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas, kegiatan ini didukung dengan anggaran



sebesar Rp400.385.593,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp368.405.567,00 atau 92,01 persen. Target kinerja 12 (dua belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp997.144.188,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp884.158.855,00 atau 88,67persen. Target kinerja 54 (lima puluh empat) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

7. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp1.245.029.360,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp908.400.779,00 atau 72,96 persen. Target kinerja 15 (lima



belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan, tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

III. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp1.451.882.412,00 realisasi sebesar Rp1.279.563.295,00 atau 88,13 persen, target kinerja Opini BPK atas LKPD, tingkat capaian kinerja WTP, didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp369.874.677,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp340.496.572,00 atau 92,06 persen. Target kinerja 14 (empat belas) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp372.766.438,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp317.361.223,00 atau 85,14 persen. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya



jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi, tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp425.096.343,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp385.316.896,00 atau 90,64persen. Target kinerja 5 (lima) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp13.847.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp9.263.000,00 atau 66,90 persen, dikarenakan tidak adanya penyelesaian di majelis TGR (Tuntutan Ganti Rugi). Target kinerja 1 (satu) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan



perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

5. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp162.512.169,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp141.155.560,00 atau 86,86 persen. Target kinerja 162 orang, realisasi capaian kinerja yaitu terlaksananya jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kota Bandar Lampung, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.
6. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/Kota, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp107.785.785,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp85.970.044,00 atau 79,76 persen. Target kinerja 32 (tiga puluh dua) lembaga, realisasi capaian kinerja yaitu terlaksananya jumlah BLUD Kota Bandar Lampung yang dibina, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

IV. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp122.692.434.002,00 realisasi sebesar Rp60.206.493.274,00 atau 49,07 persen, target kinerja yaitu terlaksananya persentase urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan :



1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp49.083.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp41.696.000,00 atau 84,95persen. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman daerah kota Bandar Lampung, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.
2. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp12.675.516.689,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.624.197.088,00 atau 52,26 persen, dikarenakan didalam sub kegiatan tersebut terdapat subsidi bunga UMKM yang merupakan program Wali Kota yang baru terserap sebagian. Bantuan UMKM tahun 2023 sebanyak 42 UMKM dengan total nilai bunga Rp8.037.744, ditahun 2024 sebanyak 80 UMKM dengan total nilai bunga Rp11.519.362, dan ditahun 2025 Sebanyak 65 UMKM dengan total nilai bunga Rp6.362.252. Target kinerja 6 (enam) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.



3. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp34.307.034.313,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp18.105.208.010,00 atau 52,77persen, dikarenakan sebagian penerima tidak mengajukan usulan Pendataan untuk Menerima bantuan tersebut. Target kinerja 12 (dua belas) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

4. Pengelolaan dana darurat dan mendesak, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp75.660.800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp35.435.392.176,00 atau 46,83 persen, dikarenakan dana pada sub kegiatan ini dikhususkan untuk mengantisipasi keadaan yang sifatnya darurat dan mendesak. Target kinerja 12 (dua belas) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

V. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp2.156.956.188,00 realisasi sebesar Rp1.898.974.088,00 atau 88,04 persen, target kinerja terlaksananya persentase pengelolaan data dan implementasi



sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah, tingkat capaian kinerjasebesar 100,00 persen didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan :

1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp161.724.370,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp143.545.039,00 atau 88,76 persen. Target kinerja 4 (empat) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.
2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp286.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp257.300.000,00 atau 89,97persen. Target kinerja 12 (dua belas) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.
3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp1.709.231.818,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.498.129.049,00 atau



87,65persen. Target kinerja 30 (tiga puluh) orang ASN (Aparatur Sipil Negara), realisasi capaian kinerja yaitu terlaksananya jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kota Bandar Lampung, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Dengan dukungan anggaran sebesar **Rp3.589.306.766,00** realisasi sebesar **Rp2.715.224.375,00** atau **75,65 persen** dengan target kinerja persentase Laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen, didukung oleh 1 (satu) kegiatan:

- 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran sebesar Rp3.589.306.766,00realisasi sebesarRp2.715.224.375,00atau75,65 persen target kinerja terlaksananya persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, tingkat capaian kinerjasebesar 100, 00 persen, didukung oleh 8 (delapan) subkegiatan:**

1. Penyusunan Standar Harga, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp216.266.278,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp214.444.350,00 atau 99,16 persen. Target kinerja 1 (satu) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah standar harga, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.



2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp108.073.076,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp70.115.030,00 atau 64,88 persen. Target kinerja 2 (dua) dokumen realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp182.503.480,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp85.683.774,00 atau 46,95 persen, tidak terealisasi dikarenakan ada rekening kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dianggap pemerintah pusat tidak terlalu mendesak sehingga dialihkan untuk program prioritas. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.
4. Pengamanan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp960.659.566,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp602.922.554,00 atau 62,76 persen, dikarenakan honor kegiatan tidak dapat dicairkan karena proses persertifikasinya belum selesai. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya



jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

5. Penilaian Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp120.580.578,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp5.904.247,00 atau 79,54 persen. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.
6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp507.787.273,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp313.110.679,00 atau 61,66 persen, dikarenakan ada efisiensi dalam pengadaan belanja modal dan adanya situasi yang tergantung oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) dan KPKNL. Target kinerja 20 (dua puluh) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.
7. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, kegiatan ini di dukung dengan anggaran



sebesar Rp765.248.328,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp619.990.174,00 atau 81,02 persen. Target kinerja 2 (dua) dokumen, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan barang milik daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp728.188.187,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp713.053.567,00 atau 97,92 persen. Target kinerja 1 (satu) laporan, realisasi capaian kinerja yaitu tersusunnya jumlah laporan barang milik daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 100, 00 persen.



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025



Tabel. 3.1.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah								
I			Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 persen	103,33persen			
			Profesionalisme Pengelolaan Aset Daerah							
1				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persen	100 persen	-	-	
1.1				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	100 persen	-	-	
1.2				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 dokumen	100 persen	-	-	



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.3				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	2 dokumen	100 persen	-	-	
1.4				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	2 dokumen	100persen	-	-	
1.5				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	2 dokumen	100persen	-	-	
1.6				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan anggaran pendapatan	3 dokumen	100persen	-	-	
1.7				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	2 dokumen	100persen	-	-	
2				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 persen	100 persen	-	-	



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	12 dokumen	100persen	-	-	
2.2				Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	3 dokumen	100persen	-	-	
2.3				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	12 dokumen	100persen	-	-	
2.4				Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	5 laporan	100persen	-	-	



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.5				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	12 dokumen	100 persen	-	-	
2.6				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	54 dokumen	100persen	-	-	
2.7				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	15 dokumen	100persen	-	-	
3				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentasi Terlaksananya Koordinasi dan dan Pelaksanaan Akuntansi dan	WTP	TA 2024 masih dalam proses penyusunan LKPD	-	-	



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Pelaporan Keuangan Daerah					
3.1				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, bulanan, triwulan dan semesteran	14 laporan	100persen	-	-	
3.2				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	1 laporan	100persen	-	-	
3.3				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	5 dokumen	100persen	-	-	
3.4				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 dokumen	100persen	-	-	



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.5				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	162 orang	100persen	-	-	
3.6				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota di bina	32 lembaga	100persen	-	-	
4				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Urusan Pinjaman Daerah, Hibah Dan Bansos, Dan Urusan Darurat	100 persen	100 persen	-	-	
4.1				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	1 laporan	100persen	-	-	
4.2				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	6 laporan	100persen	-	-	
4.3				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 laporan	100persen	-	-	



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.4				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 laporan	100persen	-	-	
5				Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 persen	100 persen	-	-	
5.1				Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	4 dokumen	100persen	-	-	
5.2				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan system informasi pemerintah daerah	12 dokumen	100persen	-	-	
5.3				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 orang	100persen	-	-	



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE LAPORAN BMD KOTA BANDAR LAMPUNG YANG TEPAT WAKTU	100%	100 persen	-	-	
1				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	-	-	
1.1				Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	1 dokumen	100persen	-	-	
1.2				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen	100persen			
1.3				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	100persen	-	-	
1.4				Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan laporan hasil pengamanan barang milik daerah	1 laporan	100persen	.-	-	
1.5				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	100persen	-	-	
1.6				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan,	20 dokumen	100persen	-	-	

**Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)**

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah					
1.7				Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	2 dokumen	100persen	-	-	
1.8				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	1 laporan	100persen	-	-	



3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Pada Tahun Anggaran 2025, peraturan/keputusan/surat Wali Kota terkait penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah dijelaskan pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Kebijakan Strategis BKAD Kota Bandar Lampung
Tahun 2025

No.	Kebijakan Strategis	Dasar hukum	Tujuan / Permasalahan yang akan diselesaikan
1.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang APBD TA 2025	Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025	APBD TA 2025 bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD TA 2025 juga menjadi acuan resmi dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah TA 2025 sehingga menciptakan anggaran yang berorientasi pada kinerja
2.	Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 43 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Penjabaran APBD TA 2025	Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025	Penjabaran APBD TA 2025 dalam peraturan walikota bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penjabaran APBD dalam peraturan walikota dapat menjadi



No.	Kebijakan Strategis	Dasar hukum	Tujuan / Permasalahan yang akan diselesaikan
			acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah
3.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2025 Tanggal 22 September 2025 Tentang Perubahan APBD TA 2025	Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025	Perubahan APBD TA 2025 dalam peraturan daerah bertujuan untuk menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan kondisi riil yang ada di lapangan
4.	Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 32 Tahun 2025 Tanggal 22 September 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025	Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025	Penjabaran Perubahan APBD dalam peraturan walikota bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien pada saat harus menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan kondisi riil yang ada di lapangan

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BKAD TAHUN2024

Tidak ada rekomendasi DPRD terhadap LKPJ BKAD Tahun 2024



3.4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BKAD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel					
1	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100,00 persen	Sangat Tinggi
Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keungan daerah					
2	Persentase laporan keuangn Kota Bandar Lampung tepat watu	100,00 persen	100,00 persen	103,33 persen	Sangat Tinggi
Meningkatnya penatusahaan asset daerah sesuai peraturan perundang-undangan					
3	Persentase laporan BMD Kota Bandar Lampung tepat waktu	100, 00 persen	100, 00 persen	100,00 persen	Sangat Tinggi



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintah yang ditugas Pembantuan

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2. Identifikasi tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah di tingkat bawahnya.

Pada Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung *tidak menerima* anggaran tugas pembantuan.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian



BAB V

PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban **Badan Keuangan dan Aset Daerah(BKAD)** Kota Bandar Lampung Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan serta aset daerah. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja, pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025 dan dapat dijadikan dasar dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandar Lampung tahun 2025.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2025 telah diupayakan secara optimal dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Berbagai Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.

Demikianlah penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, semoga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini bermanfaat dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan



Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Kami berharap Laporan Pertanggungjawaban ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk pembangunan daerah.



LAMPIRAN

1. Data penghargaan/prestasi yang dicapai/diterima oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada bidang urusan keuangan adalah :

- Tahun 2024 : Pemerintah Kota Bandar Lampung meraih predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPKRI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023
- Tahun 2025 : Pemerintah Kota Bandar Lampung meraih predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPKRI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024

2. Data Inovasi Perangkat Daerah :

➤ **Tahun 2024 :**

- 1. Aplikasi Pemda Online** merupakan Aplikasi Digital yang berbasis web service, terhubung dengan internet dan Care Banking System.

Tujuan : Pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama Kasda BPKAD Kota Bandar Lampung menjadi dalam hal Pelaksanaan sistem penatausahaan barometer dan tolak ukur transaksi non tunai yang efektif, efisien dan akuntabel.

Manfaat yang diperoleh:

- a. Memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak dalam proses pencairan dana kepada



OPD/PihakKetiga/Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

- b. Memastikan Jaminan keamanan Kas Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mumpuni dan bertanggung jawab.

HasilInovasi Daerah yang di laksanakan oleh Project Leader mempunyaipengaruh dan dampak yang besar terhadap system Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, di karenakan Kas Daerah adalah sumber dana yang akan memperlancar proses pelaksanaan kegiatan yang ada di setiap OPD, sehingga di dalam proses pemindah bukuan rekening nya harus dilakukan dengan cepat, tepat benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. SIKEUDA merupakan jenis inovasi digital.

Tujuan Implementasi Sistem SIKEUDA adalah:

- a. Integrasi seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah dalam satu platform berbasis teknologi cloud computing.
- b. Pemerintah Kota Bandar Lampung mellaui BPKAD Kota Bandar Lampung memiliki kontrol dan kelola penuh atas E-budgeting yang berbasis cloud computing;



- c. Konsolidasi data keuangan daerah dapat dilaksanakan secara otomatis.

Manfaat inovasi daerah, secara garis besar Manfaat Layanan SIKEUDA adalah :

- a. Sistem Online dan dapat di akses, 24 jam dan 7 hari dalam seminggu, dari semua tempat yang memiliki akses internet
- b. Cloud Computing
- c. Bukan hanya sekedar mengintegrasikan data, tapi juga mengintegrasikan rantai proses kerja dari mulai unit kerja, UPTD, SKPD hingga level Pemda.

Hasil yang diharapkan dari Sistem SIKEUDA adalah integrasi seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah dalam satu platform berbasis teknologi cloud computing.

3. **SIKuaD** merupakan inovasi dalam lingkup tata kelola pemerintah daerah.

Tujuan dari implementasi SIKuaD adalah :

- . Menyediakan Data base keuangan daerah yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
- a. Menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif, tepat dan akurat kepada pihak yang berkepentingan..



- b. Menambah kemampuan aparatur daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik.

Manfaat dari diterapkannya SIKuaD adalah :

- b. Mempermudah dan meningkatkan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Informasi terkait laporan keuangan dapat tersaji secara tepat dan akurat.
- d. Terwujudnya data keuangan pemerintah daerah yang Transparan dan akuntabel

Hasil dari inovasi daerah ini adalah sistem informasi keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah daerah, fleksibel dalam instalasi, mudah dalam penggunaan serta akurat dan akuntabel.

4. SIPASDA adalah jenis inovasi digital berbentuk Web

Tujuan dari Implementasi SIPASDA adalah:

- a. Menyediakan Data Barang Milik Daerah yang dapat digunakan untuk Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah daerah
- b. Menghasilkan Informasi Barang Milik Daerah yang tepat dan akurat kepada pihak yang berkepentingan

Manfaat diterapkannya SIPASDA adalah :

- . Mempermudah dan meningkatkan efektifitas dalam pencatatan Barang Milik Daerah daerah



- a. Informasi terkait Laporan Barang Milik Daerah secara tepat dan akurat
- b. Semua transaksi baik penginputan dan pelaporan dapat dilihat kapanpun dan dimanapun menggunakan laptop, computer maupun handphone yang terhubung internet

Hasil dari inovasi Barang Milik daerah ini adalah Sistem Pencatatan Barang Milik Daerah yang dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, Fleksibel dalam Instansi, mudah dalam penggunaannya serta hasil laporan lebih tepat dan akurat

5. SIMBADA merupakan jenis inovasi digital

Tujuan dari Implementasi SIMBADA adalah:

- a. Menyediakan Data Barang Milik Daerah yang dapat digunakan untuk Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah daerah
- b. Menghasilkan Informasi Barang Milik Daerah yang tepat dan akurat kepada pihak yang berkepentingan

Manfaat Inovasi :

Untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi Barang Daerah

Hasil Inovasi :

Sistem Informasi Barang daerah yang dapat memenuhi pengelolaan inventarisasi barang-barang milik daerah secara efisien dan efektif.

➤ **Tahun 2025 :**



1. Aplikasi Pemda Online merupakan Aplikasi Digital yang berbasis web service, terhubung dengan internet dan Care Banking System.

Tujuan : Pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama Kasda BPKAD Kota Bandar Lampung menjadi dalam hal Pelaksanaan sistem penatausahaan barometer dan tolak ukur transaksi non tunai yang efektif, efisien dan akuntabel.

Manfaat yang diperoleh:

- d. Memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak dalam proses pencairan dana kepada OPD/PihakKetiga/Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- e. Memastikan Jaminan keamanan Kas Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung
- f. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mumpuni dan bertanggung jawab.

HasilInovasi Daerah yang di laksanakan oleh Project Leader mempunyaipengaruh dan dampak yang besar terhadap system Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, di karenakan Kas Daerah adalah sumber dana yang akan memperlancar proses pelaksanaan kegiatan yang ada di setiap OPD, sehingga di dalam proses pemindah bukuan rekening nya harus dilakukan dengan cepat, tepat benar dan dapat dipertanggung jawabkan.



2. SIKEUDA merupakan jenis inovasi digital.

Tujuan Implementasi Sistem SIKEUDA adalah:

- d. Integrasi seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah dalam satu platform berbasis teknologi cloud computing.
- e. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui BPKAD Kota Bandar Lampung memiliki kontrol dan kelola penuh atas E-budgeting yang berbasis cloud computing;
- f. Konsolidasi data keuangan daerah dapat dilaksanakan secara otomatis.

Manfaat inovasi daerah, secara garis besar Manfaat Layanan SIKEUDA adalah :

- d. Sistem Online dan dapat di akses, 24 jam dan 7 hari dalam seminggu, dari semua tempat yang memiliki akses internet
- e. Cloud Computing
- f. Bukan hanya sekedar mengintegrasikan data, tapi juga mengintegrasikan rantai proses kerja dari mulai unit kerja, UPTD, SKPD hingga level Pemda.

Hasil yang diharapkan dari Sistem SIKEUDA adalah integrasi seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah dalam satu platform berbasis teknologi cloud computing.



3. SIKuaD merupakan inovasi dalam lingkup tata kelola pemerintah daerah.

Tujuan dari implementasi SIKuaD adalah :

- c. Menyediakan Data base keuangan daerah yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
- d. Menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif, tepat dan akurat kepada pihak yang berkepentingan..
- e. Menambah kemampuan aparatur daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik.

Manfaat dari diterapkannya SIKuaD adalah :

- e. Mempermudah dan meningkatkan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan.
- f. Informasi terkait laporan keuangan dapat tersaji secara tepat dan akurat.
- g. Terwujudnya data keuangan pemerintah daerah yang Transparan dan akuntabel

Hasil dari inovasi daerah ini adalah sistem informasi keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah daerah, fleksibel dalam instalasi, mudah dalam penggunaan serta akurat dan akuntabel.

4. SIPASDA adalah jenis inovasi digital berbentuk Web

Tujuan dari Implementasi SIPASDA adalah:



- . Menyediakan Data Barang Milik Daerah yang dapat digunakan untuk Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah daerah
- a. Menghasilkan Informasi Barang Milik Daerah yang tepat dan akurat kepada pihak yang berkepentingan

Manfaat diterapkannya SIPASDA adalah :

- a. Mempermudah dan meningkatkan efektifitas dalam pencatatan Barang Milik Daerah daerah
- b. Informasi terkait Laporan Barang Milik Daerah secara tepat dan akurat
- c. Semua transaksi baik penginputan dan pelaporan dapat dilihat kapanpun dan dimanapun menggunakan laptop, computer maupun handphone yang terhubung internet

Hasil dari inovasi Barang Milik daerah ini adalah Sistem Pencatatan Barang Milik Daerah yang dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, Fleksibel dalam Instansi, mudah dalam penggunaannya serta hasil laporan lebih tepat dan akurat